BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang sering terlihat pada aktivitas masyarakat. Keterkaitan dari persoalan tingkat kemiskinan bisa melibatkan kelengkapan bagian kehidupan manusia, meskipun kehadirannya seringkali tak disadari bagi manusia yang berkaitan. Tingkat kemiskinan digambarkan seperti rendahnya penghasilan buat mencukupi kebutuhan hidup yang pokok maupun kebutuhan hidup yang minimum seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan dan kesehatan. Dalam pengertian yang makin luas, tingkat kemiskinan bersifat multidimensional, artinya tingkat kemiskinan merupakan kekurangan dalam mencukupi kebutuhan manusia yang berbagai cara itu seterusnya bisa dilihat dari macam-macam aspek (Ridzky, 2018).

Tingkat kemiskinan menurut pendapat (Sayifullah, 2016) adalah awal dan akhir dari suatu proses kemelaratan masyarakat. Berhubungan dengan faktor-faktor kelemahan jasmani, kerawanan, ketidakberdayaan atau isolasi, serta kemiskinan membuat masyarakat terjebak dan sulit keluar dari sindrom tingkat kemiskinan. Semua orang dimanapun berada pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata miskin dan tingkat kemiskinan, namun mereka enggan menelaah lebih jauh apa sebenarnya arti dari tingkat kemiskinan tersebut dan apa sebabnya seseorang dapat dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan menurut (Umaruddin U, 2018) merupakan

ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh mata pencarian serta mendapatkan penghasilan yang layak demi menunjang kehidupan yang berkeanjutan dilihat dari rendahnya gizi, pendidikan maupun kesehatan yang rendah dan sebagainya.

Tingkat kemiskinan serupa pada negara sedang berkembang. Ada sebagian faktor yang membuat negara sedang berkembang sulit akan menjadi maju. Kecocokan karakter negara tengah berkembang atas umumnya, tahap perolehan nasional negara berkembang tergolong rendah dan laju pertambahan perdagangan termasuk lambat. Pendapatan perkapita negara tengah meningkat juga sedang rendah dan perkembangannya benarbenar sangat pelan justru ada sebagian yang mengalami kebekuan. Kesenjangan ekonomi maupun ketimpangan dalam distribusi perolehan sekitar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi serta kelompok masyarakat berpenghasilan tingkat kemiskinan serta total orang yang berpengaruh dalam bawah garis kemiskinan adalah persoalan besar dalam banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Kuswantoro, 2016).

Fenomena tingkat kemiskinan adalah salah satu masalah ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia (SRI Budhi, 2013). Pembangunan dilaksanakan guna menghasilkan kesejahteraan masyarakat menggunakan peningkatan perekonomian dengan cara menangani berupa persoalan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan, ibarat masalah pengangguran dan kemiskinan yang dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi. Salah satu prioritas pembangunan adalah mengurangi atau menghapus kemiskinan.

Tingkat kemiskinan adalah persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh setiap negara sehingga sebagai pusat kepedulian pemerintah di semua negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya beragam persoalan tentang kesejahteraan, seperti ketidakmampuan buat mencukupi keperluan dasar, kondisi keterpencilan, keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan dalam mengakses layanan sosial. Sehingga kasus kemiskinan adalah kasus yang kompleks atau berkepribadian multidimensional. Misalnya tidak dilakukan penanganan yang tepat akan berakibat pada munculnya masalah sosial lainnya (Nisbah, 2018).

Tabel 1. 1 Jumlah Orang Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Rata-rata Jumlah Orang Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2015	4 577,00 PAR	13,58
2016	4 506,89	13,27
2017	4 450,72	13,01
2018	3 897,20	11,32
2019	3 743,23	10,80
2020	3 980,90	11,41

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa jumlah orang miskin dan presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

mengalami penurunan di setiap tahunnya, meskipun penurunan disetiap tahun tergolong relatif kecil dan di tahun 2020 mengalami kenaikan.

Indonesia menjadi negara berkembang tentunya menghadapi permasalahan ini. Kemiskinan menjadi salah satu agenda yang patut diperhatikan karena secara tersirat kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat yang merata secara material dan spiritual. Dari kemiskinan, bisa muncul masalah-masalah sosial lain seperti meningkatnya pemukiman kumuh, pekerja seks komersial, anak jalanan yang kebanyakan adalah anak putus sekolah, tingkat kejahatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi salah satu target pembangunan yang perlu dievaluasi secara berkala (Lily Leonita, 2019).

Permasalahan tingkat kemiskinan adalah persoalan yang rumit atau bersifat multidimensional. Usaha pengentasan tingkat kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, atau dilakukan secara teratur. Upaya penyelesaian tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan empat pilar yang disebut "Grand Strategy". Pertama, memperbanyak kesempatan kerja, ditujukan guna menciptakan keadaan atau lingkungan ekonomi, politik, maupun sosial yang mengharuskan masyarakat miskin bisa mendapatkan kesempatan untuk kebutuhan hak-hak dasar atau peningkatan taraf hidup secara terus-menerus. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan buat

memperlancar kelembagaan sosial, politik, ekonomi, atau budaya masyarakat maupun memperluas keterlibatan masyarakat miskin pada pengambilan kepastian kebijakan publik yang menjamin kemuliaan, perlindungan, dan pemenuhan kelayakan dasar. Ketiga, kenaikan kapasitas, dilakukan kepada peningkatan kemampuan dasar atau kemampuan berusaha masyarakat miskin agar mampu memanfaatkan kemajuan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan buat memberikan perlindungan atau rasa tentram pada kelompok sensitif maupun masyarakat miskin yang pria maupun perempuan itu disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif darurat ekonomi, maupun konflik social (Ridho A, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan cukup untuk mengatasi kemiskinan, namun pertumbuhan adalah syarat yang dibutuhkan. Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan, sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengenali bahwa pemerintah sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Kegiatan pertumbuhan ekonomi bermakna perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, sesuai pertambahan kuantitas serta pembuatan barang industri, perkembangan infrastruktur, kenaikan

jumlah sekolah, kenaikan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada serta kenaikan lainnya (Mohammad I, 2019).

Salah satu yang memastikan kemakmuran suatu masyarakat serta keberhasilan pembangunan disuatu daerah dilihat dari bagian ekonominya, contohnya meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah (Sudiana, 2015). PDRB merupakan indikator yang dipakai buat mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka tingkat kemiskinan kecenderungan akan menurun (Myanti A. A, 2013).

PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan bagi semua unit usaha disuatu wilayah, atau jumlah seluruh harga barang dan jasa akhir itu dihasilkan untuk seluruh unit ekonomi di satu wilayah. Semakin tinggi perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah melambangkan semakin baik aktivitas ekonomi daerah.

Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 5.47 %, di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5.25 %,

Adapun faktor berbeda yang mempengaruh tingkat kemiskinan adalah inflasi. Inflasi adalah salah satu penanda perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya sering diupayakan rendah serta stabil agar tidak membuat penyakit makro ekonomi yang nantinya akan membagikan dampak ketidakstabilan pada perekonomian. Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Desrini N, 2018).

Faktor yang berbeda mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah investasi. Investasi pada hakikatnya adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Pada biasanya investasi dibedakan, sebagai berikut : investasi untuk financial assets serta investasi untuk real assets. Investasi untuk financial assets digunakan di pasar uang, contohnya sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan sebagainya. maupun di pasar modal, contohnya saham, obligasi, waran opsi, dan sebagainya. Sedangkan

investasi pada real assets diwujudkan dalam struktur pembelian assets produktif, pendirian pabrik, penebasan pertambangan, penebasan perkebunan, dan sebagainya (Waruwu, 2016).

Investasi adalah salah satu penanda pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi dapat mengembangkan pembuatan barang-barang maupun jasa-jasa itu sangat bernilai dari pembuatan barang-barang maupun jasa-jasa sebelumnya. Peningkatan investasi juga dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkat pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak mereka dan dapat menabung untuk masa depan mereka (Silalahi, 2012).

Tabel 1. 3 Penyertaan Modal (Investasi) Tahun 2015-2020

i	Tahun
	2015
	2016
	2017
)	2018
7	2019
	2020
7	2019

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Adapun faktor berbeda yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Kejadian ini menegaskan bahwa IPM memasuki satu posisi penting pada manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan penanda pembangunan manusia lainnya akan sebagai kunci bagi terlaksananya perencanaan serta pembangunan yang tersusun. IPM adalah tolak ukur pembangunan di daerah hendaknya berkorelasi positif terhadap keadaan kemiskinan di daerah tersebut karena diharapkan suatu daerah itu mempunyai IPM tinggi, sebaiknya kapasitas hidup masyarakat harus tinggi dan dapat dikatakan pula bahwa misalnya nilai IPM tinggi, maka sebaiknya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Sayifullah, 2016)

Indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk melalui tiga dimensi dasar adalah sebagai berikut: umur panjang serta sehat, pendidikan dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia (IPM) memaparkan dengan cara penduduk memperoleh penghasilan pembangunan ekonomi dalam memperoleh penghasilan, kesehatan serta pendidikan yang layak. Bagian pembuat indeks pembangunan manusia (IPM) mencakup : angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita itu dibenarkan (Novianto, 2018).

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2015	69,49
2016	69,98
2017	70,52
2018	71,12
2019	71,73
2020	71,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin meningkat, dari 69,49 di tahun 2015 sampai 71,87 di tahun 2019.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Ridzky, 2018) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016 dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di pulau tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan (Ni Ketut E. E, 2016) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh postif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Jusak S, 2018) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat

Kemiskinan Di Sulawesi Utara dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Umaruddin U, 2018) yang meneliti tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi Indutri Kecil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2016 dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Sayifullah, 2016) yang meneliti tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sehingga penulis tertarik ingin mendalami dan mengkaji kembali tentang "Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2020"

1.2 Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- Penelitihan ini dibatasi lokasinya hanya pada Provinsi Jawa Tengah 6 Tahun terakhir dari penelitihan, yaitu tahun 2015-2020
- Penelitihan hanya menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi, dan IPM untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah PDRB berdampak terhadap tingkat kemiskinan?
- 2. Apakah inflasi berdampak terhadap tingkat kemiskinan?
- 3. Apakah investasi berdampak terhadap tingkat kemiskinan?
- 4. Apakah IPM berdampak terhadap tingkat kemiskinan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah :

- 1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan
- 2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan
- 3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan
- 4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, yakni diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai bahan dasar penelitian dan pemecahan permasalahan serta menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai analisis PDRB, inflasi, investasi, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Lembar Akademik

Untuk lembaga akademik semoga dapat menambah ilmu ekonomi, dan bahan rekomendasi bagi para pembaca yang membutuhkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan inspirasi dan masukan pada peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.